



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JOSE ARIF LUKITO
2. Jabatan : KEPALA KANTOR WILAYAH
3. NHK : 766327

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.060.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/90 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.060.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 437.200.000

1. MOTOR, HONDA LEGENDA Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
2. LAINNYA, SEPEDA SEPEDA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 300.000
3. LAINNYA, SEPEDA POLYGON POLYGON Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000
4. LAINNYA, SEPEDA POLYGON STRATTOS 4 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
5. MOTOR, YAMAHA GEAR 125 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
6. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
7. MOBIL, KIA CARENS Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 390.000.000
8. LAINNYA, SEPEDA POLYGON XPATH Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 18.500.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	43.357.046
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.559.057.046
III. HUTANG	Rp.	299.094.864
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.259.962.182

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : CEPI KURNIADI
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN UMUM
3. NHK : 164173

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 350.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m²/84 m² di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 197.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER ULTIMATE 1.5L ULTIMATE K (4X2) A/T / MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
2. MOTOR, YAMAHA FAZZIO BEJ A/T / SEPEDA MOTOR R2 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 17.100.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.920.016

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 566.020.016

III. HUTANG Rp. 17.771.596

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 548.248.420

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi



pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANTONY SAPUTRA**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA**
3. NHK : **766341**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.292.875.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 54 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI , Rp. 420.000.000
2. Tanah Seluas 1.039 m2 di KAB / KOTA BLITAR, Rp. 310.000.000
3. Tanah Seluas 129 m2 di KAB / KOTA BLITAR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah Seluas 1.175 m2 di KAB / KOTA KOTA BLITAR , Rp. 105.000.000
5. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KUTAI KARTANEGARA, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
6. Tanah Seluas 85 m2 di KAB / KOTA KOTA BLITAR , HASIL SENDIRI Rp. 134.625.000
7. Tanah Seluas 1.375 m2 di KAB / KOTA BLITAR, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
8. Tanah Seluas 1.650 m2 di KAB / KOTA BLITAR, HASIL SENDIRI Rp. 948.250.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **29.000.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 338.185.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 212.421.975

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.872.481.975

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.872.481.975

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DIDITH ANDREAS ANDIANA
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA
3. NHK : 262744

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **751.860.328**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 99 m2/114 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah Seluas 1.148 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/50 m2 di KAB / KOTA GARUT, Rp. 81.785.500
4. Tanah Seluas 247 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI Rp. 70.074.828

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **202.200.000**

1. MOBIL, ISUZU PANTHER MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.200.000
3. MOTOR, HONDA B5DO2K29M2MT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
4. MOTOR, KAWASAKI BJ175A Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
5. MOTOR, KTM KD 25 J M/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000



6. MOTOR, HONDA CB 100 Tahun 1977, HASIL SENDIRI Rp.
12.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	868.214.600
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	132.563.845
F. HARTA LAINNYA	Rp.	30.000.000
Sub Total	Rp.	1.984.838.773

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.984.838.773

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DWI WAHYUDI
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 1024817

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.612.200.000**

1. Tanah Seluas 159 m2 di KAB / KOTA MOJOKERTO, Rp. 242.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 456 m2/170 m2 di KAB / KOTA MOJOKERTO, Rp. 1.010.200.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/36 m2 di KAB / KOTA MOJOKERTO, HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **382.500.000**

1. MOTOR, HONDA SUPRA 125 Tahun 2018, WARISAN Rp. 6.500.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
3. MOTOR, HONDA ADV 150 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000
4. MOTOR, HONDA PCX 160 CC Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 37.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **21.500.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **18.000.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **2.034.200.000**



III. HUTANG

Rp. 319.568.625

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.714.631.375

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EVAN WIDYATAMA
2. Jabatan : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SORONG
3. NHK : 123129

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	750.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 35 m2/35 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	115.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	467.571.526
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.332.571.526

III. HUTANG **Rp.** **917.534.992**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **415.036.534**

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HARIST SYAFIUDDIN
2. Jabatan : KEPALA BIDANG KEPATUHAN INTERNAL, HUKUM, DAN INFORMASI
3. NHK : 834963

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.750.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , Rp. 1.750.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	200.000.000
1. MOTOR, KAWASAKI Z250 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000		
2. MOBIL, RENAULT KOLEOS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	81.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	11.514.003
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.043.014.003
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.043.014.003

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DADANG NOOR FITHRI
2. Jabatan : PEJABAT FUNGSIONAL PENILAI PEMERINTAH MADYA
3. NHK : 767116

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	132.500.000
1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2010, HASIL SENDIRI	Rp.	132.500.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	70.562.000
D. SURAT BERTHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	28.677.785
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	231.739.785

III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	231.739.785

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SANDHI MANDALA PUTRA
2. Jabatan : PRANATA KEUANGAN APBN MAHIR/PENGAWAS KEUANGAN NEGARA
MAHIR
3. NHK : 455814

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	460.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , Rp. 460.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	7.500.000
1. MOTOR, YAMAHA LEXI Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	35.672.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	29.080.690
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	532.252.690
III. HUTANG	Rp.	460.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	72.252.690

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.